



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025 – 2026

3. Perencanaan

3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2026.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan;

d. Sebagai acuan

- d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelengaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan semua personil aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 2 (dua) tahun.

(2) Penyusunan Renstra

- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Kebijakan Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

(3) Hasil pemantauan

- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas/Perencana kegiatan Dinas yang diketahui oleh Sekretaris Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
- pelaksanaan Kegiatan Program Dinas; dan
 - hasil pelaksanaan Renstra Dinas.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat diubah dalam hal:
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.
 - terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan Keuangan Daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

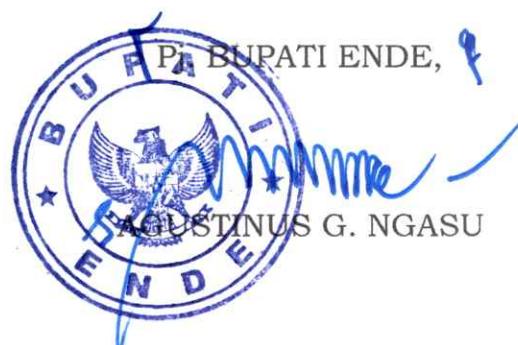
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

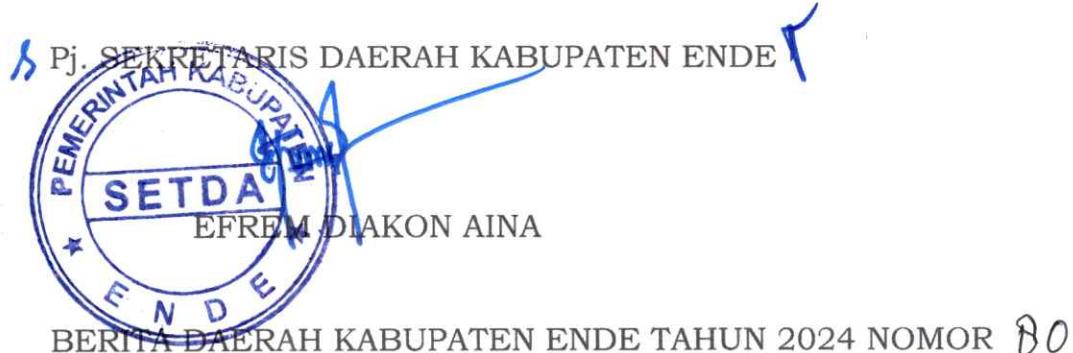
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dapat terselesaikan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini disusun untuk mendapatkan dokumen yang strategis yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang keadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sehingga dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan urusan pendidikan yang baik.

Dalam pelaksanaan kajian penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik fasilitas, pikiran maupun tenaga. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat.

Akhirnya kami menyadari, bahwa penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif selalu kami terima guna kesempurnaan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende pada tahun berikutnya.

Ende, 2 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



MALTITIS MENSITIWE, SE, M.Si.,Akt.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19721017 199903 2 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2026

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	21
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	22
2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	22
2.7. Kerja sama Perangkat Daerah	22
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	23
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2. Isu Strategis	27
Bab IV Tujuan dan Sasaran	29
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	29
4.2. Cascading Kinerja Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	30
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	52
Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	54
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	66
7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 ...	66
7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	67
Bab VIII Penutup	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin	9
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan	9
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai menurut Jabatan Struktural dan Fungsional	10
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural	10
Tabel 2.6 Jumlah Satuan Pendidik	11
Tabel 2.7 Jumlah Kepala Sekolah berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 2.8 Jumlah Pendidik berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 2.9 Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 2.10 Tabel Sarana Prasarana/Aset	12
Tabel 2.11 Kondisi Ruang Kelas per Jenjang	13
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pelayanan melalui Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2019-2023	15
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	17
Tabel 2.14 Capaian IPM, HLS, dan RLS	20
Tabel 3.1 Tabel Pemetaan Permasalahan	25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 4.2 Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	31
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	52
Tabel 6.1 Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	55
Tabel 7.1 Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	66
Tabel 7.2 Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skema Hubungan antara Dokumen RPD dan Renstra PD	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	8

BAB I

PENDAHULUAN

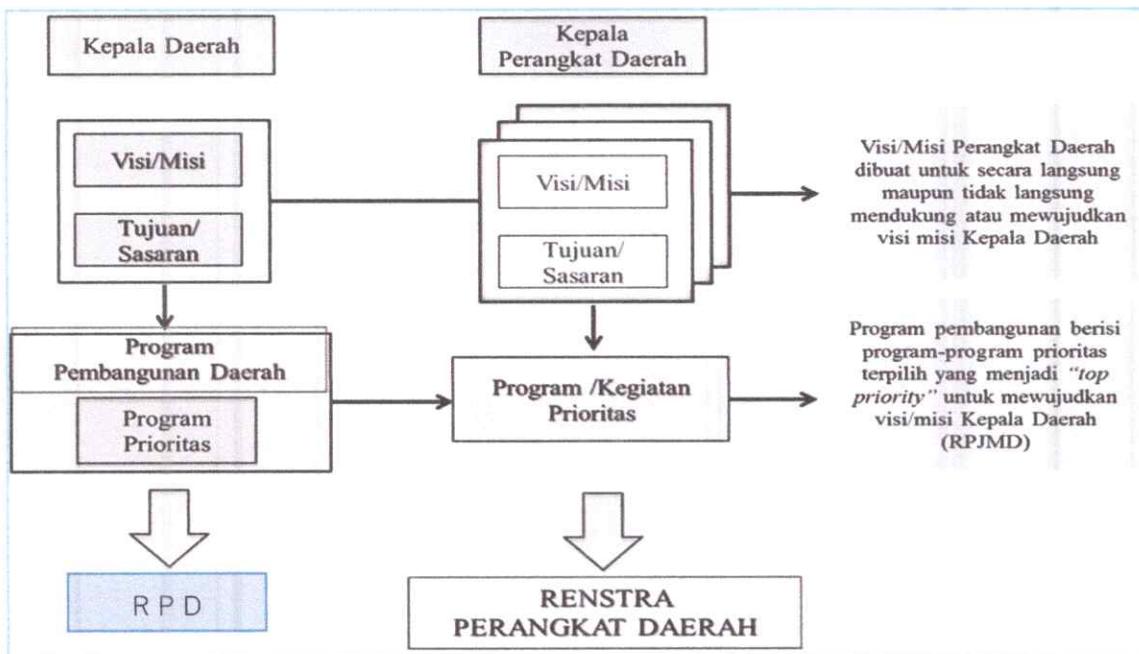
1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026. Berkaitan Instruksi Menteri tersebut, dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Ende terpilih periode tahun 2019-2024 pada bulan April Tahun 2024, menjadi titik tolak disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende, yaitu periode tahun 2025-2026. Konsekuensi logis dari tahapan perencanaan pembangunan daerah ini diikuti dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode Tahun 2019-2024, dilanjutkan dengan disusunnya Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2026, dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende periode tahun 2025-2026. Dokumen Renstra inilah yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende untuk tahun 2025 hingga tahun 2026.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini, dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada penyusunan perencanaan strategik yang diperlukan bahan kajian seperti berikut :

- 1) Perhatian terhadap perencanaan yang dibuat dan keterpaduannya dengan proses yang ditetapkan untuk menjamin keberhasilan pencapaiannya; dan
- 2) Kehati-hatian dalam menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik serta menentukan langkah-langkah tindakan secara terbuka dan juga kehati-hatian dalam memanfaatkan pandangan kelompok pemangku kepentingan utama.

Berikut adalah skema hubungan antar dokumen perencanaan antara dokumen RPD dan Renstra PD:



Gambar 1. Skema Hubungan antara Dokumen RPD dan Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12. Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah merumuskan Tujuan, Sasaran, Program serta Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende tahun 2025-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah menuangkan Tujuan, Sasaran dan Program serta Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende untuk tahun 2025-2026 ke dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran umum pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

Berisi tentang tugas; fungsi dan struktur organisasi; sumber daya; Kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

BAB III Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Berisi tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende; telaahan Renstra K/L dan rencana Propinsi; Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu- isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menjelaskan Rencana Program Dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende tahun 2025-2026

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Ende tahun 2025-2026.

Bab VIII Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende selaku penanggung jawab sektor pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Ende memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun anggaran 2025-2026 yang mengacu pada Misi 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Ende

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan

1. Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 pasal 16 ayat (2) tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi

pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 36 tahun 2021 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Membantu Bupati melaksanakan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pertolongan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2. Sekretariat:

Melaksanakan Koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretaris Dinas terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan Rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.

3. Bidang PAUD terdiri atas :

- a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan formal.

- ✓ Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- ✓ Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter

- b. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar serta evaluasi.

- ✓ Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- ✓ Seksi Pesertadidik dan Pembangunan Karakter

- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan

sekolah menengah pertama dan menjalankan fungsi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama serta melaksanakan evaluasi.

- ✓ Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- ✓ Seksi Pesertadidik dan Pembangunan Karakter

d. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal serta tenaga kebudayaan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal serta tenaga kebudayaan dan memberikan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan serta melaksanakan evaluasi.

- ✓ Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- ✓ Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidik Dasar

e. Bidang Kebudayaan

Melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan dan menyelenggarakan fungsi: penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian serta melaksanakan evaluasi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional (pengawas sekolah)

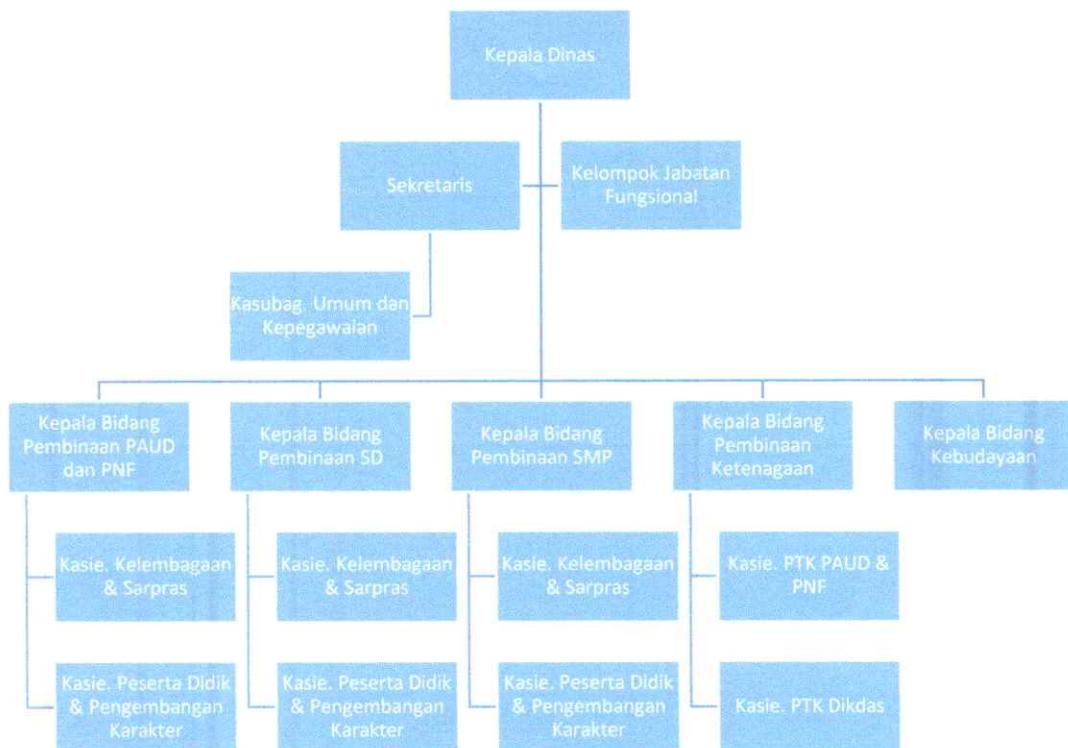
- ✓ Pengawas TK
- ✓ Pengawas SD
- ✓ Pengawas SMP

g. Satuan Pendidikan

h. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional dan mempunyai fungsi sebagai sub koordinator substansi Keuangan, program evaluasi dan pelaporan, kurikulum penilaian, tenaga budaya, cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta substansi Kesenian.

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ende



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Secara umum tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini perangkat-perangkat struktural dan fungsional sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2021 Bab IV Pasal 2 ayat 1 mempunyai Tugas Pokok adalah membantu Bupati melaksanakan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pertolongan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas seperti pada ayat 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi;

- Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- Pelaksanaan administrasi Dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1. Ketenagaan

2.2.1.1. Tenaga Dinas

Sumber daya manusia yang terlibat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan structural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara lengkap komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan ruang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1 Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Wanita	
1.	Dinas P & K	21	19	40
2.	Pengawas	12	11	23
	Total	33	30	63

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Tabel 2.2 Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan							Total
		SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1.	Dinas P & K			9		29	2		40
2.	Pengawas					20	3		23
	Total			9		49	5		63

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Tabel 2.3. Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan

No.	Golongan	Uraian		Total
		Dinas P & K	Pengawas	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1		1
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	1	7	8
3.	Pembina (IV/a)	6	10	16
4.	Penata Tk. I (III/d)	12	4	16
5.	Penata (III/c)	6	2	8
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2		2
7.	Penata Muda (III/a)	7		7

No.	Golongan	Uraian		Total
		Dinas P & K	Pengawas	
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	5		5
9.	Pengatur (II/c)			
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)			
11.	Pengatur Muda (II/a)			
12.	Juru Tk. I (I/d)			
13.	Juru (I/c)			
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)			
15.	Juru Muda (I/a)			
	Total	40	23	63

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Tabel 2.4. Komposisi pegawai menurut jabatan struktural dan fungsional

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	II-b	1
2.	Sekretaris	III-a	1
3.	Kepala Bidang	III-b	5
4.	Kepala Sub Bagian	IV-a	1
5.	Kepala Seksi	IV-a	8
6.	Fungsional (Sub Koordinator)		
7.	Funisional (Pengawas)		8
8.	Pelaksana		16
	Total		40

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	ADUM/ADUMLA/PIM IV	6
2.	SPAMA/Diklat PIM III	
3.	SPAMEN/Diklat PIM II	1
	Total	7

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

2.2.1.2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik memiliki peranan sangat penting dalam menentukan mutu dan kelangsungan proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan mulai dari tingkatan PAUD, SD dan SMP serta Pendidikan Kesetaraan. Data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dibanding dengan jumlah satuan pendidikan dan peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6. Jumlah Satuan Pendidikan

No.	Jenjang	Satuan Pendidikan	Negeri	Swasta	Total
1.	PAUD	TK	2	104	106
		Kober	0	146	146
		SPS	0	4	4
2.	Pendidikan Dasar	SD	177	157	334
		SMP	57	33	90
3.	Kesetaraan	SKB	1	0	1
		PKBM	0	7	7
	Total		237	451	688

Sumber Data Dapodik Keadaan Agustus 2024

Tabel 2.7. Jumlah Kepala Sekolah berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang	Satuan Pendidikan	SMA	Diploma	Sarjana	Total
1.	PAUD	TK	43	4	56	103
		Kober	88	7	57	152
		SPS			2	2
2.	Pendidikan Dasar	SD	32	9	293	334
		SMP		1	88	89
3.	Kesetaraan	SKB			1	1
		PKBM	3		3	6
	Total		166	21	500	687

Sumber Data Dapodik Keadaan Agustus 2024

Tabel 2.8. Jumlah Pendidik berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang	Satuan Pendidikan	SMA	Diploma	Sarjana	Total
1.	PAUD	TK	96	15	102	213

No.	Jenjang	Satuan Pendidikan	SMA	Diploma	Sarjana	Total
		Kober	174	6	75	255
		SPS	3	1		4
2.	Pendidikan Dasar	SD	218	147	2308	2673
		SMP	46	35	2140	2221
3.	Kesetaraan	SKB	1		2	3
		PKBM	10		9	19
	Total		548	204	4636	5388

Sumber Data Dapodik Keadaan Agustus 2024

Tabel 2.9. Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang	Satuan Pendidikan	SMA	Diploma	Sarjana	Total
1.	PAUD	TK	16	1	8	25
		Kober	19	1	11	31
		SPS	1			1
2.	Pendidikan Dasar	SD	139	29	139	307
		SMP	134	20	71	225
3.	Kesetaraan	SKB	1		1	2
		PKBM	10		1	11
	Total		320	51	231	602

Sumber Data Dapodik Keadaan Agustus 2024

2.2.2. Sarana Prasarana

a. Kondisi sarana dan prasarana Dinas P&K

Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dapat dilihat pada Tabel data sarana prasarana / aset yang terdiri atas:

Tabel 2.10 Tabel Sarana Prasarana / Aset

No	Jenis Aset Tetap	Jumlah Aset Tetap	Nilai Aset Tetap
1.	Tanah	322	10.190.793.265,00
2.	Peralatan dan Mesin	6.813	100.547.050.414,58
3.	Gedung dan Bangunan	1.231	276.304.528.554,50
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	172	8.286.448.532,23
5.	Aset Tetap Lainnya	12.733	27.346.625.579,44

No	Jenis Aset Tetap	Jumlah Aset Tetap	Nilai Aset Tetap
6.	Konstruksi Dalam Pengerajan	11	1.188.696.500,35
	Total	21.282	423.864.142.846,11

Sumber Data : Data Barang Milik Daerah per 31 Desember 2023

b. Kondisi sekolah

Adapun data kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11. Kondisi ruang kelas per jenjang

NO	JENJANG	STATUS SEKOLAH			ROMBEL	RUANG KELAS			
		N	S	JUMLAH		B	RR	RB	JML
1	KOBER	0	150	150	0	321	5	0	326
2	SKB/PKBM	1	7	8	0	28	1	0	29
3	TK	2	102	104	199	249	0	0	249
4	SD	177	157	334	2.130	2.467	58	1	2.526
5	SMP	57	33	90	558	814	54	0	868
TOTAL		237	449	686	2.887	3.879	118	1	3.998

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Sedangkan dalam bidang kebudayaan adanya peningkatan pelestarian terhadap berbagai bentuk kebudayaan lokal, disebutkan jenis dan ragam situs dan cagar budaya yang dikelola. Pada tahun 2021 jumlah situs yang dibina sebanyak 22 (dua puluh dua) buah situs dari 22 situs yang ada atau sebesar 100%. Adapun 22 buah situs/cagar budaya yang dilestarikan tersebut adalah Perkampungan megalithik Wolotopo, Kampung Unggu Kanganara, Mumi Kaki More Wolondopo, Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah adat Bhisu One Jopu, Rumah adat Wiwipemo, SaO Ria Raja Nggaji-Wolojita, Museum Tenun Ikat, Perkampungan adat Koanara, Perkampungan adat Wolotolo, situs kampung adat Kanganara, Makam Ibu Amsi, KampungAdat Detukeli, Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Camat Ende Utara, Kantor Detasemen POM Ende, Kantor Kodim Ende, Gedung Imaculata, Situs Gereja Kathederal Ende, Masjid A-Rabitha, Situs Percetakan PT Ani Ende, Rumah Raja Ende.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk menggambarkan kinerja layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, dapat dilakukan dengan menguraikan berbagai capaian pembangunan pendidikan yang berhasil diraih Kabupaten Ende periode 2019-2024. Berikut hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende periode Tahun 2018-2023 ditunjukkan dengan Tabel 2.1 (T.C-23) berikut:

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Pelayanan melalui Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
I.	IKU Sebelum Perubahan																		
1.	Presentasi Guru SD yang memenuhi Standar Komptensi				54,18%	51,18%				49,17%	77,38%				90,75%	151,19%			
2.	Presentasi Guru SMP yang memenuhi Standar Komptensi				60,87%	54,87%				50,84%	93,17%				83,52%	169,80%			
3.	APK Pendidikan Usia Dini (PAUD)				82,20%	82,20%				60,86%	52,23%				74,04%	63,54%			
4.	Angka melek huruf				96,35%	95,80%				95,89%	97,68%				99,52%	101,96%			
5.	Rerata Nilai USBN				68,08	69,08%				0,00%	0				0,00%	0,00%			
6.	Rerata Nilai UN				48,64	49,14%				0,00%	0				0,00%	0,00%			
7.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A				697	968				935	1041				134,15%	107,54%			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B				613	613				799	869				130,34%	141,76%			

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Jumlah prestasi yang diraih oleh Siswa/i di tingkat Provinsi atau Nasional				2	2				0	0				0,00%	0,00%			
10.	Percentase budaya lokal yang dilestarikan				95,45%	95,45%				90,91%	100,00%				95,24%	104,77%			
11.	Jumlah Festival seni dan budaya yang diselenggarakan dalam satu tahun				2	2				1	1				50,00%	50,00%			
II. IKU Setelah Perubahan																			
1.	Rata-rata Nilai Kompetensi Peserta Didik							1,74	1,84					1,57	1,56		90,23%	84,78%	
2.	APK Jenjang Pendidikan PAUD							88,20%	91,20%					59,71%	44,19%		67,70%	48,45%	
3.	Percentase Guru Berijazah S1							81,71%	86,71%					66,11%	80,14%		80,91%	92,42%	
4.	Percentase Cagar Budaya dan Nilai Budaya Lokal yang dilestarikan							100,00%	100%					20,87%	100%		20,87%	100,00%	
5.	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							B	B					CC	B		50,00%	100,00%	

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.588.233.125,00					4.332.823.539,00						94,43%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		248.907.500,00					241.482.773,00						97,02%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		22.308.175,00					22.278.000,00						99,86%		
Program Pendidikan Anak Usia Dini		339.649.998,00					329.679.006,00						97,06%		
Program Pengembangan Nilai Budaya		487.183.000,00					320.483.000,00						65,78%		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		43.704.218.974,00					39.937.204.252,00						91,38%		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya		618.000.000,00					503.628.950,00						81,49%		
Program Pendidikan Non Formal		1.516.803.001,00					1.392.834.500,00						91,83%		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		4.460.000,00					4.460.000,00						100,00%		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		128.770.327,00					118.750.909,00						92,22%		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		243.156.049.403,00	225.011.212.233,00	226.578.144.726,00			226.607.844.470,00	218.948.874.355,00	222.306.549.079,00				93,19%	97,31%	98,11%
Program Pengelolaan Pendidikan		43.512.081.487,00	114.309.692.753,00	139.930.509.000,00			30.569.154.154,00	91.438.463.530,45	133.727.929.736,00				70,25%	79,99%	95,57%

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			92.999.928,00		200.000.000,00			80.769.300,00		199.652.000,00			86,85%		99,83%
Program Pengembangan Kebudayaan			1.735.207.856,00	3.982.032.000,00	384.000.000,00			1.345.051.940,00	1.614.822.000,00	368.340.000,00			77,52%	40,55%	95,92%
Program Pengembangan Kesenian Tradisional			41.143.696,00					27.059.000,00					65,77%		
Program Pembinaan Sejarah			108.465.702,00	100.000.000,00				90.009.000,00	99.732.309,00				82,98%	99,73%	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			31.625.492,00	719.137.500,00				14.801.210,00	718.703.000,00				46,80%	99,94%	

Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pada tabel 2.12 dan 2.13 diatas dapat dilihat bahwa secara kinerja dan anggaran terjadi peningkatan dalam realisasinya baik secara kinerja dan secara anggaran meskipun setiap tahun terjadi penurunan anggaran yang signifikan. Tapi hal ini menjadi tantangan dalam perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan daerah agar terus dapat memberikan kinerja pelayanan yang semakin maksimal.

Pada tabel 2.12, dapat dilihat terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Utama, dimana pada tahun 2020 dan 2021 menggunakan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Renstra tahun 2019-2024 (Renstra Awal) sedangkan di tahun 2022 dan 2023 telah menggunakan Indikator Kinerja Utama perubahan berdasarkan Renstra 2019-2024 Perubahan. Jika dicermati lebih mendalam, terdapat beberapa indikator yang melebihi dari target yang ditetapkan. Pada penetapan awal 2020 dan 2021, beberapa indikator yang memenuhi target antara lain: presentasi guru SD dan SMP yang memenuhi standar kompetensi (2021), Angka Melek Huruf (2021), Angka Partisipasi Sekolah baik jenjang SD dan SMP (2020 dan 2021), persentase budaya lokal yang dilestarikan (2021). Hal ini diakibatkan dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan terhadap tenaga pendidik di Kabupaten Ende dan banyak guru yang telah mengikuti pendidikan Sarjana, sehingga telah memenuhi standar kompetensi selain itu dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang SD dan SMP dimana sebagian besar anak berusia 7-15 tahun telah mengenyam pendidikan dasar (SD dan SMP), berdampak pada peningkatan angka melek huruf (kemampuan membaca). Selain itu pada bidang kebudayaan, terjadinya peningkatan diakibatkan semakin banyak kebudayaan daerah yang dilakukan pelestarian, melalui kegiatan rehabilitasi rumah-rumah adat maupun fasilitas yang berkaitan dengan kebudayaan di Kabupaten Ende. Sedangkan indikator lainnya mengalami penurunan, bahkan ada yang tidak ada realisasi sama sekali, misalnya pada indikator nilai rerata USBN dan UN karena terjadi perubahan dalam kebijakan ujian akhir sekolah, dimana ujian akhir sekolah, untuk kelulusan diserahkan ke masing-masing sekolah. Selain itu jumlah prestasi yang diraih oleh siswa/i di tingkat Provinsi maupun Nasional karena tidak ada peserta didik dari Kabupaten Ende yang mengikuti lomba-lomba tersebut. Untuk APK jenjang PAUD mengalami penurunan dikarenakan kebijakan bagi peserta didik baru di kelas 1 jenjang Sekolah Dasar tidak wajib mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD).

Untuk indikator kinerja perubahan di tahun 2022 dan 2023, terdapat 2 indikator yang melebih target yang ditetapkan yakni Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan persentase cagar budaya dan nilai budaya lokal yang dilestarikan. Hal ini dikarenakan di dalam pengelolaan kinerja perangkat daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan beberapa perubahan antara lain dengan melakukan penyusunan perjanjian kinerja dan evaluasi terkait kinerja dari masing-masing aparatur serta hampir semua cagar budaya dan nilai budaya lokal telah dilakukan pelestarian. Sedangkan untuk indikator lainnya belum memenuhi target karena nilai kompetensi peserta didik di bidang literasi dan numerasi yang dihasilkan dari Asesmen Nasional belum sesuai

dengan standar yang ditetapkan, selain itu APK jenjang PAUD juga masih rendah, karena kebijakan yang belum mewajibkan peserta didik kelas 1 SD mengikuti pendidikan anak usia dini, persentase guru yang berijazah S1 juga belum memenuhi target, karena terdapat guru-guru yang belum berijazah S1.

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Ende adalah Indeks Pendidikan, yang merupakan unsur penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pendidikan didapatkan dari 2 unsur indikator meliputi: (1) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), (2) Angka Rata Rata Lama Sekolah (RLS). Kondisi Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Ende selama tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.14 Capaian IPM, HLS dan RLS

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah
2019	67,20	13,77	7,80
2020	67,04	13,78	7,81
2021	67,30	13,79	8,03
2022	67,97	13,81	8,09
2023	68,63	13,82	8,20

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Namun, ada kelemahan cara hitung ini yaitu tidak meng-cover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun.

HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ende sepanjang tahun 2019 sampai 2023 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2019 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ende sebesar 13,70 dan pada tahun 2023 sebesar 13,82. Kondisi ini menggambarkan bahwa warga peserta didik di Kabupaten Ende memiliki harapan untuk menempuh jenjang pendidikannya selama 13 Tahun lebih. Dengan kata lain, harapan untuk pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun (sampai jenjang SMA) di Kabupaten Ende dapat terwujud.

Ada beberapa faktor yang dapat menunjang meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah, beberapa diantaranya adalah akses pendidikan, semakin banyak tersedianya lembaga pendidikan di seluruh jenjang pendidikan maka semakin mudah penduduk untuk mengakses pendidikannya termasuk jenjang Pendidikan Tinggi.

b. Angka Rata Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥ 15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS/Mean Years of Schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Ende dari Tahun 2019 sampai 2023 juga mengalami kenaikan, dari tahun 2019 sebesar 7,80 meningkat sampai tahun 2023 sebesar 8,20. Meskipun kenaikan rata-rata lama sekolah tidak signifikan, namun peningkatan tersebut menunjukkan adanya progres dan perbaikan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat menjadi dorongan positif untuk terus memperbaiki sistem pendidikan dalam memberikan akses dan sarana yang memadai bagi para siswa untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dengan lebih baik. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, dan kualitas pengajaran dapat berkontribusi pada kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Selain itu, kenaikan angka rata-rata lama sekolah juga dapat diartikan sebagai indikator potensi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dalam beberapa tahun kedepan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Ende akan lebih meningkatkan pendidikan kesetaraan untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS) sehingga diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan rata rata lama sekolah ditahun yang akan datang.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok lingkungan pendidikan dan kelompok lingkungan kebudayaan. Lingkungan pendidikan terdiri dari peserta didik, masyarakat calon peserta didik, wali murid, guru dan tenaga kependidikan.

Lingkungan kebudayaan terdiri dari masyarakat pelaku kebudayaan dan masyarakat umum di Kabupaten Ende.

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam pemberian layanan urusan pendidikan dan kebudayaan mitra dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Bappeda;
6. BPKAD;
7. Sekretariat Daerah;
8. Pemerintah Desa;
9. Kantor Agama Kabupaten Ende.

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende untuk saat ini masih belum mendapatkan dukungan dari BUMD di Kabupaten Ende.

2.7 Kerjasama Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu masa pembangunan 2019-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende telah bekerja sama dengan beberapa pihak diluar pemerintahan Kabupaten Ende, antara lain:

1. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Pengoptimalan Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Di Daerah Dengan Internet Yang Terbatas dan Kerja Sama Peningkatan Kemampuan Membaca Peserta Didik Sekolah Dasar;
2. Southeast Asian Ministers Of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC) terkait Pengoptimalan Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Di Daerah Dengan Internet Yang Terbatas;
3. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende terkait Pengoptimalan Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Di Daerah Dengan Internet Yang Terbatas;
4. Southeast Asian Ministers Of Education Organization Regional Center For Early Childhood Care Education And Parenting (SEAMEO CECCEP) terkait Peningkatan Kompetensi Guru Dan Tenaga Kependidikan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Keluarga.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende juga berharap semakin banyak pihak-pihak lain yang dapat memberikan kerjasama dalam pencapaian pembangunan di Kabupaten Ende khususnya dalam urusan pendidikan dan kebudayaan.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan adalah langkah awal yang penting dalam menyelesaikan masalah. Beberapa langkah mengidentifikasi permasalahan yaitu menentukan masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis masalah, dan identifikasi masalah.

Dalam mengidentifikasi permasalahan itu diperlukan analisis atas kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), tantangan (*Threat*), atau analisis *SWOT* atas kondisi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Ende yang pada dasarnya merupakan gambaran tentang kinerja layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*Strength*) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program layanan pendidikan beserta realisasinya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mengalokasikan 20% dari APBD, ditambah dengan pendanaan yang besar pula bersumber dari APBN;
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sangat memadai, dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan tupoksi organisasi, dilengkapi dengan kualifikasi akademik dan keterampilan yang sesuai bagi upaya pengembangan layanan pendidikan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai sebagai faktor pendukung bagi pengembangan program- program layanan pendidikan;
4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang mampu menciptakan budaya kerja yang produktif dan iklim organisasi yang kondusif di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
5. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan (*Weakness*) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Tidak meratanya kompetensi sumber daya manusia di masing masing bidang urusan;
2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi internal;

3. Pelaksanaan program kerja masih belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan pembangunan;
4. Ketidaksesuaian pelimpahan wewenang dan tugas pokok.

Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang (*Opportunity*) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kebudayaan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
2. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat daerah, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
3. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan;
4. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun kualitasnya;
5. Arus globalisasi, keterbukaan dan makin meningkatnya persaingan antar negara pada kawasan regional maupun internasional menumbuhkan kerjasama antar negara maupun antar lembaga dalam pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Di sisi yang lain juga menumbuhkan kesadaran akan penting peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan untuk menghadapi peningkatan persaingan antar bangsa di segala sendi kehidupan;
6. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Berbagai riset dalam bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan;
7. Redistribusi guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Faktor-faktor eksternal yang merupakan tantangan (*Threat*) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan kehidupan di masyarakat dan pengambilan kebijakan serta pengembangan program-program pendidikan yang memadai untuk memenuhinya;
2. Arah kebijakan yang kurang menentu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan banyak perubahan keputusan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan pengembangan serta implementasi program yang terkesan kurang mengacu pada perencanaan jangka menengah dan bersifat parsial kurang memiliki keterkaitan yang komprehensif dengan tujuan dan sasaran yang telah dikembangkan. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan tanggapan yang cepat untuk memfasilitasi pelaksanaannya di tingkat daerah, dan seringkali menganggu kontinyuitas implementasi program dan pelaksanaan kerja yang dikembangkan di daerah kabupaten;
3. Kurangnya koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dalam implementasi program-program yang pelaksanaan dan sasarannya pada tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Selain mengganggu efektivitas dan efisiensi implementasi program-program yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Ende, hal tersebut juga menumbuhkan iklim kerja yang kurang kondusif di wilayah Kabupaten Ende.
4. Persoalan kekerasan, kesehatan fisik dan psikis, serta adiksi gawai, pornografi, judi daring dan narkoba pada peserta didik.

Permasalahan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Tabel Pemetaan Permasalahan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya SPM Pendidikan	<p>Bidang Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Masih ada anak usia 5-6 tahun yang tidak duduk dalam bangku sekolah PAUD;2. Masih ada anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya;

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya SPM Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keterbatasan sarana dan pra sarana pembelajaran; 4. Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah; 5. Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal; 6. Distribusi guru yang belum merata antar-daerah dan terbatasnya ketersediaan guru; 7. Proporsi guru penggerak masih kurang; 8. Masih Rendahnya Tata Kelola Pendidikan; 9. Kualitas pembelajaran yang masih rendah; 10. Belum optimalnya budaya literasi dan numerasi pada peserta didik; 11. Lemahnya peran aktif komite sekolah, pengawas, dewan pendidikan, serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan pendidikan; 12. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan belum optimal. 13. Lemahnya pendidikan karakter di Satuan Pendidikan maupun keluarga.
	Cagar budaya dan budaya lokal yang belum dilakukan pelestarian	<p>Bidang Kebudayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi budaya yang ada sebagai aset wisata dan peningkatan perekonomian masyarakat; 2. Kurangnya promosi, even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		<p>3. Masih rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan Hak Paten terhadap budaya lokal;</p> <p>4. Masih rendahnya apresiasi terhadap pelaku budaya;</p> <p>5. Belum optimalnya pemanfaatan peran museum dalam pelestarian budaya;</p> <p>6. Belum terintegrasinya seluruh data kebudayaan dalam Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD);</p> <p>7. Belum adanya rencana induk pelestarian budaya tingkat kabupaten Ende;</p> <p>8. Belum ada objek diduga cagar budaya sebagai cagar budaya peringkat kabupaten.</p>

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025-2026 untuk bidang pendidikan, prioritasnya ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan. Sampai menjelang tahun terakhir pelaksanaan Renstra Pendidikan Kabupaten Ende tahun 2019-2024, sejumlah keberhasilan telah berhasil diraih dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Ende. Meskipun demikian sejumlah permasalahan masih menghadang dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Ende. Permasalahan tersebut mendesak untuk segera dicari solusinya.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah masalah yang penting dan memerlukan penanganan yang strategis dan terencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Isu strategis dapat muncul dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan lingkungan. Isu strategis seringkali berdampak pada keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, pemerintah, atau masyarakat dalam mencapai tujuan.

Dalam konteks pemerintahan, isu strategis dapat berupa kebijakan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, energi, dan lingkungan. Isu-isu tersebut memerlukan perencanaan dan strategi yang matang untuk mencapai tujuan jangka panjang, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu Strategis pada Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende khususnya yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Sesuai dengan sasaran RPD 2025-2026 dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam peningkatan kualitas SDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran utama dalam peningkatan derajat pendidikan masyarakat. Strategi dalam mencapai tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat dengan cara meningkatkan pengelolaan pendidikan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian maka Standar Pelayanan Minimal Pendidikan bisa terpenuhi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki tujuan dan sasaran dalam mewujudkan kualitas pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Ende. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menyadari bahwa usaha-usaha mewujudkan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan tersebut memerlukan dukungan tata nilai yang luhur, utuh, dan cocok. Tata nilai yang luhur, utuh, dan cocok akan menjadi landasan, arah, dan pemandu pikiran, sikap, dan perilaku seluruh aparatur dan pemimpin aparatur dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsi untuk pembangunan daerah dalam urusan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Ende, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende perlu merumuskan tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan pendidikan tahun 2025-2026 secara lebih jelas dan konkret. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ende memiliki 5 Tujuan dan 14 Sasaran dimana urusan Pendidikan dan Kebudayaan ada pada Tujuan pertama, yakni **“Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing”** dengan sasaran **“Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan”**.

Dari arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ende tersebut, maka tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah:

1. Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing; dan
2. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.

Sedangkan sasaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah:

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan;
3. Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal; dan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut membutuhkan suatu indikator pengukuran yang mampu mendukung capaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Ende. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu indikator yang tajam dan terukur guna mencapai tujuan dan sasaran dengan hasil yang optimal.

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2026 harus dapat diukur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende disajikan dalam Tabel 4.1 (T.C-25) sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada		
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,83 Tahun	13,84 Tahun	13,85 Tahun
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,23 Tahun	8,31 Tahun	8,40 Tahun
2.	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	22,21%	22,08%	21,95%
3.	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal	Prosentase Budaya Lokal yang Dilestarikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %
4.	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B Nilai	B Nilai	B Nilai

4.2. Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan, maka disusunlah Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
1. Meningkatnya Kualitas SDM Kabupaten Ende yang Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia
	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indek Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2. Meningkatnya Kualitas SDM Kabupaten Ende yang Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia
	2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan		Harapan Lama Sekolah
			Rata-Rata Lama Sekolah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
			Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional
			Iklim keamanan SD
			Iklim kebinedaan SD
			Iklim inklusivitas SD
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan, termasuk di dalamnya penguatan karakter di masing-masing satuan pendidikan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
		Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
			Iklim keamanan SMP
			Iklim kebinekaan SMP
			Iklim inklusivitas SMP
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun
		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
		Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan, termasuk di dalamnya penguatan karakter di masing-masing satuan pendidikan
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
		Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
			Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
		Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan, termasuk di dalamnya penguatan karakter di masing-masing satuan pendidikan
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
		Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia
		Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, termasuk redistribusi guru ASN di satdik swasta
3. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat			Persentase penduduk miskin

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
	3.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan		Prosentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Lokal yang dilestarikan
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ritual yang Ada dan Dihayati oleh Masyarakat di Kabupaten Ende
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sanggar Seni Masyarakat yang Dibina
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		Pembinaan Lembaga Adat yang Panganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Adat yang Terbina
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya
4. Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia
	4.1. Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal		Prosentase Budaya Lokal yang Dilestarikan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian dan Pembinaan Budaya
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025-2026 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Selain itu dipertimbangkan pula hasil capaian pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 2023.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil analisis masalah. Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti tertuang dalam Tabel 5.1 (T-C.26) berikut ini :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang Berdaya Saing	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	Menyelenggarakan Proses Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau, dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan terutama untuk memastikan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan
			Meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
			Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan Guru dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan Peran Pengawas, Gugus, MGMP, MKKS, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
			Meningkatkan kemampuan literasi serta minat baca Masyarakat
			Menumbuhkembangkan generasi muda berprestasi
			Mengerakkan kembali Penguatan Pendidikan Karakter di catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
			Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Mengembangkan Kurikulum dan Program Pelatihan Berbasis Kesenian Tradisional	Merancang modul pelatihan yang relevan dengan kebutuhan komunitas seni tradisional
			Mengintegrasikan seni tradisional dalam kurikulum sekolah atau ekstrakurikuler
			Menyusun program pelatihan terpadu melibatkan pelatih profesional, maestro seni, dan institusi pendidikan seni
			Menjalin kerja sama dengan sanggar seni, perguruan tinggi seni, LSM budaya, dan lembaga swasta
			Mengundang seniman tradisional untuk menjadi fasilitator pelatihan
			Menggalang dukungan dari pemerintah pusat dan daerah melalui penganggaran dan bantuan teknis
Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal	Pemetaan dan Inventarisasi Budaya Lokal	Melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset budaya lokal seperti tradisi, seni, situs bersejarah, dan adat istiadat.
			Menyusun dokumentasi digital dan fisik sebagai arsip budaya yang mudah diakses.
			Mengidentifikasi budaya yang terancam punah untuk prioritas pelestarian.
		Penguatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat	Mengintegrasikan materi budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal.
			Menyelenggarakan kegiatan berbasis komunitas seperti seminar, lokakarya, atau pameran budaya lokal.
			Meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya pelestarian budaya melalui media sosial dan program kreatif.
		Pemberdayaan Komunitas Budaya	Memberdayakan kelompok seni, adat, dan budaya sebagai garda depan pelestarian budaya.
			Membina generasi penerus untuk menjadi pelaku aktif dalam melestarikan budaya lokal.
			Mendukung pembentukan komunitas budaya baru yang berfokus pada inovasi dalam pelestarian.
Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Mengembangkan sistem perencanaan berbasis data yang terintegrasi untuk mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan.
			Menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang relevan, terukur, dan sesuai dengan tujuan strategis organisasi.
			Menerapkan mekanisme evaluasi berbasis capaian hasil (outcome-based performance).

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dikembangkan program-program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, yang secara operasional akan diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Ende. Program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dikembangkan dalam RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengelolaannya ada pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
4. Program Pengembangan Kebudayaan.
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Selain program seperti ditampilkan pada tabel diatas, program pembangunan pendidikan dilakukan pula penguatan layanan birokrasi dan penunjang urusan pemerintahan daerah. Program tersebut meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Disadari bahwa penunjang urusan pemerintah daerah merupakan salah satu program penunjang keberhasilan dari program-program pendidikan yang dicanangkan.

Penyusunan dan penetapan program dan indikator kegiatan yang dikategorikan dalam Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 tentunya akan dilaksanakan mulai tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagai wujud evaluasi dan perubahan dalam berjalannya Renstra 2025-2026. Rencana program, kegiatan, subkegiatan dan indikator-indikatornya, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 (T.C-27) berikut ini:

Tabel 6.1. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing																	
				Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan													
				1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
				Iklim inklusivitas SD	53,24 %	61,99 %	2.529.811.907,00	70,74 %	2.561.401.588,00	79,49 %	2.647.868.361,00	79,49%	2.647.868.361,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Iklim inklusivitas SMP	55,51 %	63,49 %	2.529.811.907,00	71,47 %	2.561.401.588,00	79,46 %	2.647.868.361,00	79,46 %	2.647.868.361,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Iklim keamanan SD	62,27 %	71,05 %	1.264.905.954,00	79,83 %	1.280.700.794,00	88,61 %	1.323.934.181,00	88,61 %	1.323.934.181,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Iklim keamanan SMP	64,44 %	70,81 %	1.264.905.954,00	77,18 %	1.280.700.794,00	83,55 %	1.323.934.181,00	83,55 %	1.323.934.181,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Iklim kebinekaan SD	66,01 %	73,92 %	2.529.811.907,00	81,83 %	2.651.401.588,00	89,75 %	2.647.868.361,00	89,75 %	2.647.868.361,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Iklim kebinekaan SMP	66,99 %	71,17 %	2.529.811.907,00	75,35 %	2.561.401.588,00	79,53 %	2.647.868.361,00	79,53 %	2.647.868.361,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	58,96 %	60,02 %	2.529.811.907,00	61,08 %	2.561.401.588,00	62,13 %	2.647.868.361,00	62,13 %	2.647.868.361,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Presentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	75,14 %	100 %	15.178.871.444,00	100 %	15.368.409.528,00	100 %	15.887.210.166,00	100 %	15.887.210.166,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Presentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97,27 %	100 %	30.357.742.888,00	100 %	30.736.819.056,00	100 %	31.774.420.333,00	100 %	31.774.420.333,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Presentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	1,94 %	100 %	7.589.435.722,00	100 %	7.684.204.764,00	100 %	7.943.605.083,00	100 %	7.943.605.083,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	38,98 %	44,81 %	7.589.435.722,00	50,64 %	7.684.204.764,00	56,48 %	7.943.605.083,00	56,48 %	7.943.605.083,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	23,62 %	29,65 %	5.059.623.815,00	35,68 %	5.122.803.176,00	41,72 %	5.295.736.722,00	41,72 %	5.295.736.722,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	48,27 %	54,23 %	5.059.623.815,00	60,19 %	5.122.803.176,00	66,14 %	5.295.736.722,00	66,14 %	5.295.736.722,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	28,97 %	38,24 %	5.059.623.815,00	47,51 %	5.122.803.176,00	56,78 %	5.295.736.722,00	56,78 %	5.295.736.722,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
				Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	38.235.935.212,00	100 %	38.750.846.498,00	100 %	40.160.255.069,00	100 %	40.160.255.069,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	28.045.138.286,00	100 %	28.357.876.378,00	100 %	29.213.896.680,00	100 %	29.213.896.680,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)														
				Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	17.708.683.350,00	100 %	17.929.811.116,00	100 %	18.535.078.527,00	100 %	18.535.078.527,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100 %	7.589.435.722,00	100 %	7.684.204.764,00	100 %	7.943.605.083,00	100 %	7.943.605.083,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
				Indeks distribusi guru	0,24 %	0,34 %	5.059.623.815,00	0,44 %	5.122.803.176,00	0,54 %	5.295.736.722,00	0,54 %	5.295.736.722,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Pengalaman Pelatihan PTK	38,15 %	39,15 %	7.589.435.722,00	40,15 %	7.684.204.764,00	41,15 %	7.943.605.083,00	41,15 %	7.943.605.083,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Proporsi GTK Penggerak Jenjang PAUD	0,07 %	0,17 %	2.529.811.907,00	0,27 %	2.561.401.588,00	0,37 %	2.647.868.361,00	0,37 %	2.647.868.361,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	49,12 %	50,12 %	2.529.811.907,00	51,12 %	2.561.401.588,00	52,12 %	2.647.868.361,00	52,12 %	2.647.868.361,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	19,10 %	20,10 %	5.059.623.815,00	21,10 %	5.122.803.176,00	22,10 %	5.295.736.722,00	22,10 %	5.295.736.722,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Proporsi PTK bersertifikat Jenjang Pendidikan Dasar	89,33 %	90,33 %	5.059.623.815,00	91,33 %	5.122.803.176,00	92,33 %	5.295.736.722,00	92,33 %	5.295.736.722,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Proporsi PTK Penggerak	0,40 %	0,50 %	7.589.435.722,00	0,60 %	7.684.204.764,00	0,70 %	7.943.605.083,00	0,70 %	7.943.605.083,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1.01.04.2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
				Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100 %	37.441.214.703,00	100 %	37.908.742.232,00	100 %	39.188.451.054,00	100 %	39.188.451.054,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Menurunnya Kemiskinan Masyarakat																	
				Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan													
			2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL													
				Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	40.63 %	50.63 %	1.000.000.000,00	60.63 %	550.000.000,00	70.63 %	650.000.000,00	70.63 %	650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>		
				Terlaksanakannya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40,63 %	50,63 %	1.000.000.000,00	60,63 %	550.000.000,00	70,63 %	650.000.000,00	70,63 %	650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing																	
				Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal													
			2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
				Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	20,87 %	25,87 %	1.000.000.000,00	35,87 %	550.000.000,00	35,87 %	650.000.000,00	35,87 %	650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			2.22.02.201	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
				Persentase Ritual yang Ada dan Dilayati oleh Masyarakat di Kabupaten Ende	100 %	100 %	500.000.000,00	100 %	550.000.000,00	100 %	650.000.000,00	100 %	650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			2.22.02.202	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
				Persentase Sanggar Seni Masyarakat yang Dibina	100 %	100 %	500.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			2.22.02.203	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Presentase Lembaga Adat yang Terbina	100 %	100 %	500.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
				Percentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20,87 %	25,87 %	1.000.000.000,00	30,87 %	550.000.000,00	35,87 %	650.000.000,00	35,87 %	650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota														
				Terlaksananya Pelestarian dan Pembinaan Budaya	20,87 %	25,87 %	400.000.000,00	30,87 %	250.000.000,00	35,87 %	250.000.000,00	35,87 %	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota														
				Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20,87 %	25,87 %	600.000.000,00	30,87 %	300.000.000,00	35,87 %	400.000.000,00	35,87 %	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing																	
	Menikatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
				Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	233.500.000.000,00	100 %	236.050.000.000,00	100 %	239.000.000.000,00	100 %	239.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
				Meningkatnya Indek Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	251.000.000,00	100 %	253.735.900,00	100 %	256.905.000,00	100 %	256.905.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
				Indek Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	231.925.900,00	100 %	234.458.747,00,00	100 %	237.388.880,00,00	100 %	237.388.880,00,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		X.XX.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
				Indek Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.000.000,00	100 %	20.215.000,00	100 %	20.465.000,00	100 %	20.465.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
				Indek Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	498.000.000,00	100 %	503.428.200,00	100 %	509.717.000,00	100 %	509.717.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		X.XX.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
				Indek Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	106.000.000,00	100 %	107.155.400,00	100 %	108.490.000,00	100 %	108.490.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		X.XX.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
				Indek Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	297.600.000,00	100 %	300.843.000,00	100 %	304.600.000,00	100 %	304.600.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		X.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Indek Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	281.000.000,00	100 %	284.062.500,00	100 %	287.611.000,00	100 %	287.611.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		X.XX.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	120.500.000,00	100 %	121.813.000,00	100 %	123.332.000,00	100 %	123.332.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

Pada pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan seperti yang tertuang dalam Tabel 6.1 (T.C-27) diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain menggunakan sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum), juga mendapatkan sumber dana dari APBN yaitu dalam DAK, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang Sudah Ditentukan Penggunaannya (DAU-Specific Grant).

Bantuan DAK Fisik yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende digunakan sebagai pembiayaan peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan. Untuk bantuan DAK Non Fisik yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende berwujud dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP, dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) jenjang PAUD dan Kesetaraan, serta tambahan tunjangan antara lain, Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru dan Tambahan Penghasilan Guru.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 2 (dua) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 untuk mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025–2026 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1. Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,81 Tahun	13,83 Tahun	13,84 Tahun	13,85 Tahun	13,85 Tahun	
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,09 Tahun	8,23 Tahun	8,31 Tahun	8,40 Tahun	8,40 Tahun	
2	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	23%	22,21%	22,08%	21,95%	21,95%	
3	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal	Prosentase Budaya Lokal yang Dilestarikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
4	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.2 berikut ini:

Tabel 7.2 Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing							
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan							
		Iklim inklusivitas SD	53,24 %	61,99 %	70,74 %	79,49 %	79,49%
		Iklim inklusivitas SMP	55,51 %	63,49 %	71,47 %	79,46 %	79,46 %
		Iklim keamanan SD	62,27 %	71,05 %	79,83 %	88,61 %	88,61 %
		Iklim keamanan SMP	64,44 %	70,81 %	77,18 %	83,55 %	83,55 %
		Iklim kebinaaan SD	66,01 %	73,92 %	81,83 %	89,75 %	89,75 %
		Iklim kebinaaan SMP	66,99 %	71,17 %	75,35 %	79,53 %	79,53 %
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	58,96 %	60,02 %	61,08 %	62,13 %	62,13 %
		Presentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	75,14 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Presentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97,27 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Presentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	1,94 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	38,98 %	44,81 %	50,64 %	56,48 %	56,48 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	23,62 %	29,65 %	35,68 %	41,72 %	41,72 %
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	48,27 %	54,23 %	60,19 %	66,14 %	66,14 %
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	28,97 %	38,24 %	47,51 %	56,78 %	56,78 %
		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indeks distribusi guru	0,24 %	0,34 %	0,44 %	0,54 %	0,54 %
		Pengalaman Pelatihan PTK	38,15 %	39,15 %	40,15 %	41,15 %	41,15 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Proporsi GTK Penggerak Jenjang PAUD	0,07 %	0,17 %	0,27 %	0,37 %	0,37 %
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	49,12 %	50,12 %	51,12 %	52,12%%	52,12% %
		Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	19,10 %	20,10 %	21,10 %	22,10 %	22,10 %
		Proporsi PTK bersertifikat Jenjang Pendidikan Dasar	89,33 %	90,33 %	91,33 %	92,33 %	92,33 %
		Proporsi PTK Penggerak	0,40 %	0,50 %	0,60 %	0,70 %	0,70 %
		Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonform al/Kesetaraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan						
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	40,63 %	50,63 %	60,63 %	70,63 %	70,63 %
		Terlaksanakannya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40,63 %	50,63 %	60,63 %	70,63 %	70,63 %

Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing

	Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal						
		Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	20,87 %	25,87 %	35,87 %	35,87 %	35,87 %
		Persentase Ritual yang Ada dan Dilayati oleh Masyarakat di Kabupaten Ende	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sanggar Seni Masyarakat yang Dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Presentase Lembaga Adat yang Terbina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20,87 %	25,87 %	30,87 %	35,87 %	35,87 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya Pelestarian dan Pembinaan Budaya	20,87 %	25,87 %	30,87 %	35,87 %	35,87 %
		Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20,87 %	25,87 %	30,87 %	35,87 %	35,87 %

Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing

Menikatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Indek Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indek Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indek Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indek Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indek Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indek Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indek Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Hasil penentuan target tujuan dan sasaran serta kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2026 diharapkan dapat tercapai dengan baik dalam realisasi kinerja pada setiap tahunnya. Sehingga pencapaian target tersebut dapat berdampak sangat signifikan dalam membantu pembangunan daerah khususnya dalam urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Ende.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang memuat tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025-2026 untuk urusan pendidikan dan kebudayaan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende setiap tahunnya. Di dalamnya memuat hal-hal penting terkait penajaman kembali arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, sinkronisasi kebijakan kepala perangkat daerah dengan kebijakan nasional, penajaman kembali dalam hal program, indikator, pagu dan target Tahun 2025-2026 serta penyesuaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran RPD.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa kaidah pelaksanaan Penyusunan Renstra yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra berlaku untuk tahun 2025-2026, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
3. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

